

SEKILAS TENTANG

BPK

Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah



**Apa itu
BPK?**



BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara

BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi



DASAR HUKUM BPK

UUD 1945 Bab VIIIA Pasal 23E, 23 F dan 23G

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa keuangan

KEDUDUKAN BPK

DALAM KETATANEGARAAN

UUD 1945

```
graph TD; UUD[UUD 1945] --- MPR[MPR]; UUD --- Presiden[Presiden]; UUD --- DPR[DPR]; UUD --- DPD[DPD]; UUD --- BPK[BPK]; UUD --- MA[Mahkamah Agung]; UUD --- KY[Komisi Yudisial]; UUD --- MK[Mahkamah Konstitusi];
```

MPR

Presiden

DPR

DPD

BPK

Mahkamah
Agung

Komisi
Yudisial

Mahkamah
Konstitusi

TUGAS BPK



Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara

WEWENANG BPK

Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan.

Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh semua lembaga yang mengelola keuangan negara

Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara

Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK

NILAI DASAR BPK



I

INDEPENDENSI

Kelembagaan
Organisasi
Individu



I

INTEGRITAS

Jujur
Objektif
Tegas



P

PROFESIONALISME

Hati-hati
Teliti, cermat
Berpedoman pada standar

SIAPA SAJA YANG DISEBUT BPK??

BPK ADALAH 9 ANGGOTA YANG TERDIRI DARI:

1 KETUA

1 WAKIL KETUA

7 ANGGOTA

KEANGGOTAAN BPK RI PERIODE 2019-2024



KETUA
Agung Firman Sampurna



WAKIL KETUA
Agus Joko Pramono



ANGGOTA I
Hendra Susanto



ANGGOTA II
Pius Lustrilanang



ANGGOTA III
Achsanul Qosasi



ANGGOTA IV
Isma Yatun



ANGGOTA V
Bahrullah Akbar



ANGGOTA VI
Harry Azhar Azis



ANGGOTA VII
Daniel Lumban Tobing

VISI DAN MISI BPK

VISI BPK

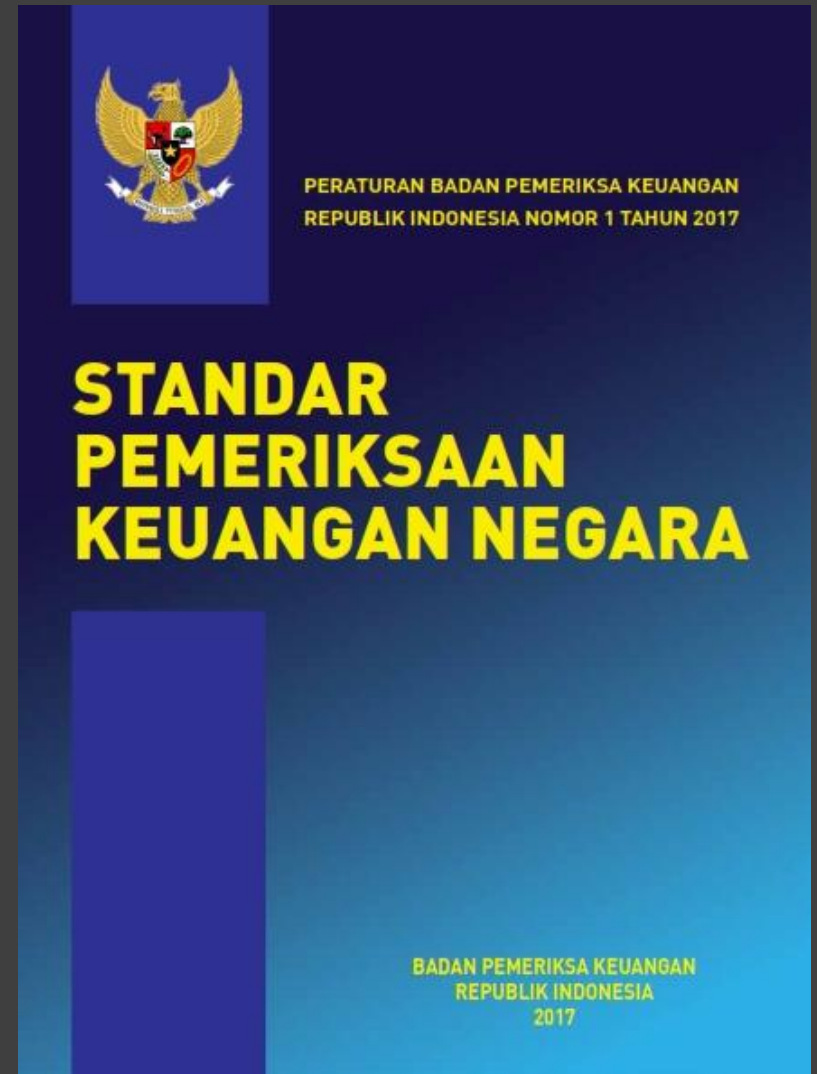
Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat

MISI BPK

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

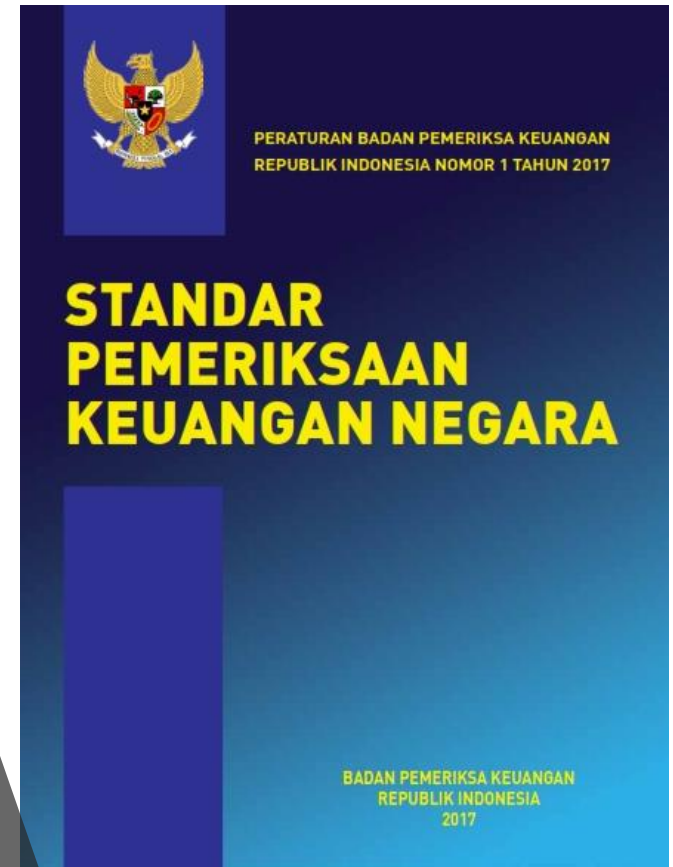
SPKN

- Pelaksanaan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- SPKN ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017



SPKN

- SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan yang memadai
- SPKN berlaku bagi:
 - BPK
 - Akuntan publik atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK
 - Akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasar ketentuan undang-undang.
 - APIP yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu





TAHAPAN PEMERIKSAAN

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, meliputi

Perencanaan

Pengumpulan
Bukti Pemeriksaan

Pengembangan
Temuan
Pemeriksaan

Supervisi



PENYUSUNAN LAPORAN

JENIS
PEMERIKSAAN
BPK

PEMERIKSAAN KEUANGAN >>
OPINI

PEMERIKSAAN KINERJA >>
SIMPULAN dan REKOMENDASI

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN
TERTENTU >> **SIMPULAN**

Opini BPK

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ *Qualified Opinion*)

- sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.

Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ *Unqualified Opinion*)

- sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan.

Tidak Memberikan Pendapat (TMP/ *Disclaimer Opinion*)

- apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah.

Tidak Wajar (TW/ *Adverse Opinion*)

- sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material.

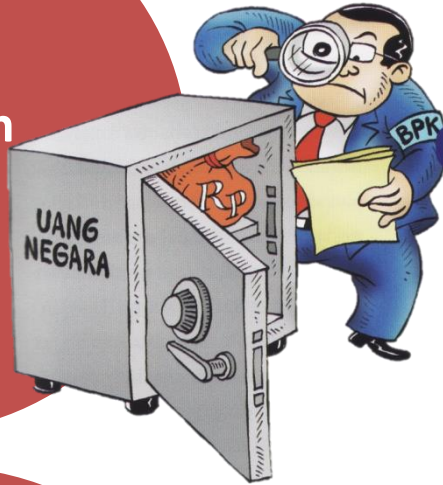
Hubungan BPK dengan APIP

- BPK RI → **Lembaga Pemeriksa** (External Auditor)
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) → **Lembaga Pengawas** (Internal Auditor)
 - Inspektorat Jenderal Kementerian
 - Inspektorat Prov./Kab./Kota
 - Auditor Intern BUMN/BUMD
 - BPKP
- BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan APIP
- Laporan Hasil Pemeriksaan APIP wajib disampaikan kepada BPK
- Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dari APIP untuk dan atas nama BPK



SISTEM KERJA BPK

Melakukan
Pemeriksaan
Keuangan
Negara



Hasil
Pemeriksaan
diserahkan
kepada DPR,
DPRD
dan DPD.



Kerja sama dengan
Aparat Penegak
Hukum, antara lain
pemberian
keterangan ahli dan
penghitungan
kerugian daerah



Memantau
Tindak Lanjut
Pemeriksaan
BPK



[www.cpnns.bpk.go.id](https://cpns.bpk.go.id)

PENERIMAAN
PEGAWAI
PADA
PELAKSANA
BPK RI

<https://cpns.bpk.go.id/page/alur-pendaftaran>
Alur dan Berkas Pendaftaran

Alur Pendaftaran Persyaratan Administrasi

ALUR PENDAFTARAN CPNS BPK



PENDAFTARAN MELALUI PORTAL CPNS BPK



A large, dark blue ink splatter graphic with irregular, feathered edges, centered on a white background. The splatter has a textured, painterly appearance with some lighter blue and white tones at the edges.

**BPK PERWAKILAN
PROVINSI JAWA
TENGAH**



BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

**Diresmikan Tanggal
18 Desember 2008**

Berkedudukan di Jl.Perintis
Kemerdekaan No.175, Semarang,
Jawa Tengah

Telp. 024-8660825,8660826
Fax. 024 - 8660884

STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH



AYUB AMALI

Kepala Perwakilan



BAGUS KURNIAWAN

Kepala
Subauditorat Jateng I



ARGO WASKITO

Kepala
Subauditorat Jateng II



RAMZUHRI

Kepala
Subauditorat Jateng III



MASMUDI

Kepala
Subauditorat Jateng IV



ACEP MULYADI

Kepala
Sekretariat Perwakilan

PEJABAT
FUNGSIONAL
Pemeriksa



ATHUR SARAGI

Kasubbag. TU Kalan



SITI R. ARIFAH

Kasubbag. Humas



FAJAR HUDAYA

Kasubbag. SDM



SANDRA NURSANTIE

Kasubbag. Keuangan



ZUFRIZAL

Kasubbag. Umum & TI



SUSI HANDAYANI

Kasubbag. Hukum

JAWA TENGAH I

-  Provinsi Jawa Tengah
-  Kota Semarang
-  Kabupaten Semarang
-  Kota Salatiga
-  Kabupaten Pati
-  Kabupaten Demak
-  Kabupaten Jepara
-  Kabupaten Kudus
-  Kabupaten Rembang

JAWA TENGAH II

-  Kota Surakarta
-  Kabupaten Boyolali
-  Kabupaten Klaten
-  Kabupaten Sukoharjo
-  Kabupaten Wonogiri
-  Kabupaten Blora
-  Kabupaten Grobogan
-  Kabupaten Karanganyar
-  Kabupaten Sragen

JAWA TENGAH III

-  Kabupaten Banjarnegara
-  Kabupaten Kebumen
-  Kabupaten Cilacap
-  Kabupaten Purbalingga
-  Kota Magelang
-  Kabupaten Magelang
-  Kabupaten Purworejo
-  Kabupaten Temanggung
-  Kabupaten Wonosobo

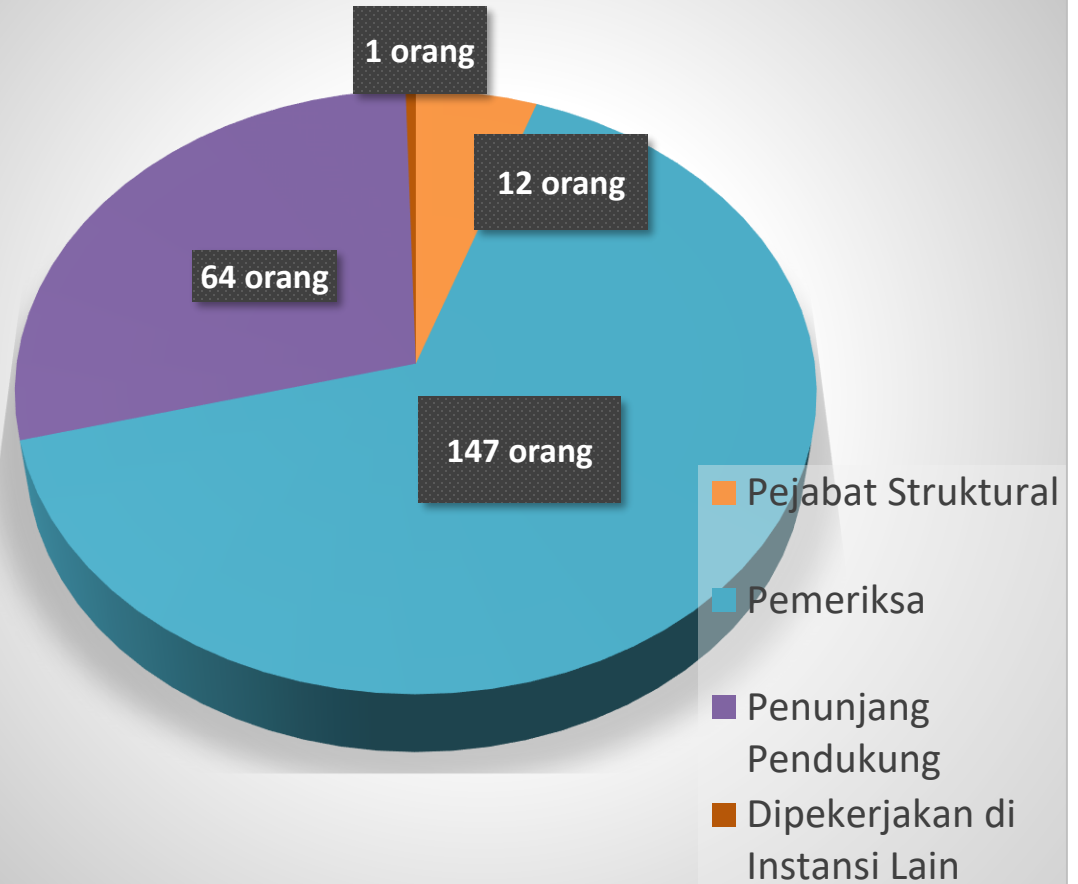
JAWA TENGAH IV

-  Kota Pekalongan
-  Kabupaten Pekalongan
-  Kabupaten Banyumas
-  Kabupaten Batang
-  Kabupaten Kendal
-  Kota Tegal
-  Kabupaten Tegal
-  Kabupaten Brebes
-  Kabupaten Pemalang

WILAYAH PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

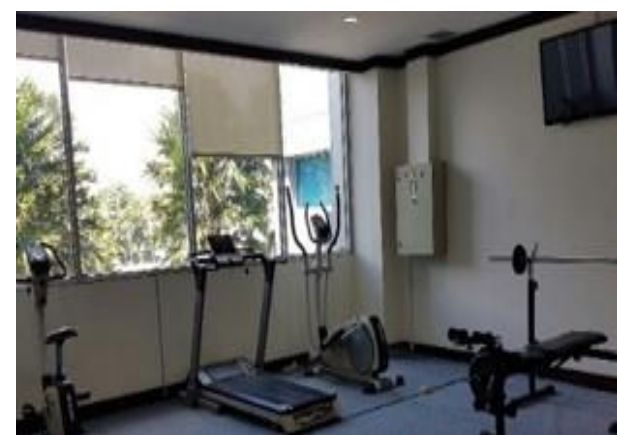
**STATISTIK
PEGAWAI DI
BPK
PERWAKILAN
PROVINSI JAWA
TENGAH**
-Berdasarkan Jenis Jabatan-

Komposisi Pegawai





Auditor in Action...



FASILITAS KANTOR BPK PERWAKILAN PROV. JAWA TENGAH





KILAS BERITA

Pembangunan Masjid Agung Karanganyar Segera Dimulai, Ini Tahapannya



Berita Utama

Mahasiswa Polines Semarang Antusias Mengikuti Kunjungan Studi di BPK Perwakilan Provinsi...

5 Februari 2020

Delapan puluh orang mahasiswa D-III Politeknik Negeri Semarang Jurusan Akuntansi berkunjung ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng pada Selasa (6/2/2020). Tgl. ...

BPK Serahkan LHP Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Provinsi Jawa Tengah

Berita Utama 2 Februari 2020

Donor Darah untuk Kepedulian dan Kesehatan

Berita Utama 23 Januari 2020

Upacara Bendera dan Tasyakuran Meriahkan Peringatan HUT ke-73 BPK

Berita Utama 21 Januari 2020

Jelang Pemeriksaan atas LKPD TA 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jateng Gelar Diklat untuk



WEBSITE BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
(semarang.bpk.go.id)

PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan tempat/sarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik BPK RI sebagai langkah pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui PIK menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik ataupun dalam mengajukan pengaduan/keluhan.

INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME

TERIMA KASIH